

Rekonstruksi Subjektivitas Perempuan: Visi Saudi 2030 di Tengah Ortodoksi Wahabisme dan Agenda Transformasi Pembangunan Pasca-Minyak

Auliya Habibah

Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Gadjah Mada
e-mail : ahabibah52@gmail.com

Abstract

Saudi Vision 2030 integrates women into the post-oil development agenda as an effort to address the crisis of the rentier economic structure. This study aims to analyze the reconstruction of women's subjectivity in Saudi Vision 2030 amid the tension between Wahhabi orthodoxy and the post-oil development transformation agenda. Using Spivak's postcolonial feminist perspective, this study argues that the integration of women into the economic participation under Saudi Vision 2030 does not merely reflect an emancipation project, but is part of the state's strategy in responding to the rentier economic crisis. The representation of women as subjects of development tends to be instrumental and has the potential to distort women's agency itself. This study employs a qualitative approach using a single-case study method and a literature review. The findings reveal that the state reconstructs women's subjectivity through the production of development discourses, the top-down institutionalization of policies, and the restriction of women's political spaces. This process involves the co-optation of Wahhabi religious authorities to maintain social legitimacy. This study is significant because it critiques the narrative of gender reform, which is often viewed as a form of "progressivism." Gender transformation within Saudi Vision 2030 must be understood as an adaptation of social structures to post-oil economic demands, as well as a political instrument to strengthen state control over societal and political dynamics. Thus, this study emphasizes the importance of positioning women as autonomous political subjects to achieve holistic gender equality.

Keywords: *Postcolonial Feminism, Post-Oil Development, Saudi Vision 2030, Wahhabi Orthodoxy, Women's Subjectivity.*

Abstrak

Visi Saudi 2030 mengintegrasikan perempuan ke dalam agenda pembangunan pasca-minyak sebagai upaya mengatasi krisis struktur ekonomi rentier. Penelitian ini bertujuan menganalisis rekonstruksi subjektivitas perempuan dalam Visi Saudi 2030 di tengah ketegangan antara ortodoksi Wahabisme dan agenda transformasi pembangunan pasca-minyak. Dengan menggunakan perspektif feminisme pascakolonial Spivak, penelitian ini berargumen bahwa integrasi perempuan ke dalam partisipasi ekonomi Visi Saudi 2030 tidak semata mencerminkan proyek emansipasi, melainkan bagian dari strategi negara dalam merespons krisis ekonomi rentier. Representasi perempuan sebagai subjek pembangunan cenderung bersifat instrumental dan berpotensi mendistorsi agensi perempuan itu sendiri. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus tunggal dan metode studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara merekonstruksi subjektivitas perempuan melalui produksi wacana pembangunan, institusionalisasi kebijakan yang top-down, serta pembatasan ruang politik perempuan. Proses ini melibatkan kooptasi otoritas keagamaan Wahabi guna mempertahankan legitimasi sosial. Penelitian ini penting untuk dikaji karena mengkritisi narasi reformasi gender yang kerap dipandang sebagai bentuk “progresivitas”. Transformasi gender dalam Visi Saudi 2030 mesti dipahami sebagai bentuk adaptasi struktur sosial terhadap tuntutan ekonomi pasca-minyak sekaligus instrumen politik untuk memperkuat kontrol negara atas dinamika sosial dan politik masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini menekankan pentingnya menempatkan perempuan sebagai subjek politik otonom demi terciptanya kesetaraan gender yang holistik.

Kata kunci: Feminisme Pascakolonial, Ortodoksi Wahabisme, Pembangunan Pasca Minyak, Subjektivitas Perempuan, Visi Saudi 2030.

Pendahuluan

Urgensi keterlibatan perempuan dalam Visi Saudi 2030 mulanya dibentuk sebagai upaya untuk mengatasi krisis struktural ekonomi Arab Saudi yang selama puluhan tahun bertumpu pada sektor minyak. Dalam konteks global, ketergantungan struktural terhadap model ekonomi rentier menjadi masalah serius, terutama saat terjadi prediksi titik puncak minyak pada tahun 2030 dan penurunan drastis fluktuasi harga minyak dari \$112 per barel di bulan Juni 2014 menjadi \$59 per barel di bulan Desember 2014 (Schulte, 2024; Jawadi dan Ftiti, 2019). Meski Arab Saudi telah berhasil mengatasi penurunan fluktuasi harga minyak di tahun-tahun sebelumnya, akan tetapi

penurunan pada tahun 2014 diiringi dengan peningkatan pasokan minyak global oleh Revolusi Shale oil yang mengakibatkan perubahan struktur pasar energi global dan berimplikasi terhadap penurunan pendapatan fiskal Arab Saudi secara tajam (Ansari, 2017).

Dalam konteks kawasan, peluncuran Visi Saudi 2030 tidak terlepas dari keberhasilan negara Teluk lain seperti Qatar, Uni Emirat Arab, dan Bahrain yang telah terlebih dahulu mengembangkan model ekonomi pasca-minyak sebelum Arab Saudi. Hal ini menciptakan tekanan kompetitif bagi Arab Saudi untuk segera mentransformasi struktur ekonomi rentier secara serius (Al Naimi, 2021). Di sisi lain, menurut laporan McKinsey Global & Company (2015) secara internal ketergantungan terhadap minyak berimplikasi terhadap rendahnya tingkat produktivitas tenaga kerja dan menghambat penciptaan lapangan kerja di sektor lain sehingga menyebabkan tingkat pengangguran di Arab Saudi tinggi. Seluruh kondisi ini mendorong Kerajaan Arab Saudi untuk tidak lagi sekedar melakukan kebijakan reaktif, seperti beradaptasi terhadap siklus harga, akan tetapi melakukan transformasi ekonomi yang lebih struktural melalui agenda pembangunan pasca-minyak.

Visi Saudi 2030 kemudian diluncurkan di bawah kepemimpinan Mohammed bin Salman (MBS) pada 25 April 2016 (Jawadi dan Ftiti, 2019). Cetak biru ini merupakan kerangka kebijakan strategis jangka panjang yang bertujuan mentransformasi struktur ekonomi nasional dari ketergantungan minyak menuju ekonomi yang lebih terdiversifikasi dan berkelanjutan serta membangun tatanan sosial baru yang lebih kompatibel dengan pasar global modern (Schulte, 2024). Menurut laporan McKinsey Global & Company (2015) salah satu upaya yang mesti dilakukan Arab Saudi dalam agenda transformasi pembangunan pasca-minyak adalah meningkatkan produktivitas tenaga kerja perempuan karena dinilai dapat mempercepat proses diversifikasi dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Dalam dokumen Visi Saudi 2030 (2016), Kerajaan Arab Saudi berencana meningkatkan partisipasi tenaga kerja perempuan sebesar 30% di tahun 2030. Kemudian sejumlah kebijakan diimplementasikan untuk mendorong angka partisipasi perempuan seperti, pencabutan larangan mengemudi bagi perempuan, pelonggaran sistem perwalian, dan perluasan akses perempuan terhadap pendidikan, pelatihan vokasional, dan sektor publik lainnya (Vasinton, 2020). Dalam dokumen tersebut, perempuan direpresentasikan sebagai great asset atau sumber daya ekonomi yang belum dimanfaatkan secara optimal dan diharapkan dapat mendorong percepatan adaptasi model ekonomi nasional dengan standar pasar global (Saudi Vision 2030, 2016).

Penelitian ini melihat bahwa Visi Saudi 2030 tidak hanya dirumuskan untuk menata ulang struktur ekonomi secara semata, tetapi juga berupaya merekonstruksi tatanan gender konservatif untuk meningkatkan produksi ekonomi dan mempercepat pertumbuhan ekonomi pasca-minyak. Visi Saudi 2030 memang memberikan ruang partisipasi ekonomi bagi perempuan yang sebelumnya dibatasi oleh sistem perwalian dan norma sosial konservatif dengan merepresentasikan perempuan sebagai subjek pembangunan (Hudhayri, 2021).

Namun apabila dilihat lebih jauh, representasi tersebut tidak diiringi dengan semangat emansipasi. Hal ini menunjukkan adanya relasi kuasa yang mengubah cara perempuan direpresentasikan dan diposisikan oleh negara untuk kepentingan ekonomi Kerajaan. Di sisi lain, konstruksi representasi perempuan sendiri tidak terlepas dari restrukturisasi tatanan gender yang dibentuk oleh relasi simbiotik antara Kerajaan dan Wahabisme (Al-Rasheed, 2013). Restrukturisasi ini menjadi tantangan dalam merealisasikan Visi Saudi 2030 untuk menegosiasikan ulang batas-batas norma religius dan sosial masyarakatnya, termasuk partisipasi perempuan untuk mendapat legitimasi politik dari ulama Wahabi (Ulya dan Basyar, 2026). Oleh karena itu, penelitian ini juga melihat Visi Saudi 2030 sebagai arena kontestasi dan negosiasi antara pemerintah Arab Saudi dan ulama Wahabi untuk melegitimasi tatanan gender yang baru.

Kurang dari satu dekade setelah peluncuran Visi Saudi 2030, angka target partisipasi perempuan telah tercapai dan dinaikan sebesar 36 % (Saudi Vision 2030, 2024). Tidak sedikit media massa dan situs pemerintah, khususnya laporan tahunan Visi Saudi yang menilai hal ini sebagai sebuah “progresivitas”. Namun, capaian tersebut menjadi permasalahan ketika tidak diiringi dengan keterlibatan perempuan Saudi sebagai subjek politik otonom. Hal ini didasarkan dengan munculnya aksi represif pemerintah Arab Saudi terhadap 11 aktivis perempuan gerakan Women2Drive setelah beberapa minggu pencabutan pelarangan mengemudi perempuan (Topal, 2019). Integrasi perempuan dalam Visi Saudi 2030 tanpa melibatkannya sebagai subjek politik berpotensi menciptakan kebijakan yang top down dan mengkooptasi agensi perempuan melalui narasi pembangunan. Oleh karena itu, penting untuk melihat integrasi perempuan dalam Visi Saudi 2030 dengan menempatkan perempuan sebagai subjek politik yang otonom.

Sejumlah studi terdahulu telah menyoroti integrasi perempuan dalam Visi Saudi 2030. Cerioli (2019) melalui analisis wacananya meninjau bahwa peran perempuan dalam agenda transformasi ekonomi Saudi baru bersifat ambigu dan selektif karena di satu sisi negara merepresentasikan perempuan sebagai kemajuan negara, tetapi di sisi lain ruang gerak politik perempuan dibatasi dan dikontrol. Cerioli (2019) menyebut Visi Saudi 2030 sebagai program rekayasa sosial untuk mengorientasi ulang hubungan

negara dan masyarakat. Selaras dengan hal ini, Eum (2019) berargumen bahwa Visi Saudi membentuk figur “perempuan baru” yang tidak dimaksudkan untuk tujuan emansipasi, tetapi untuk pertumbuhan ekonomi dan memperkuat kontrol negara. Di sisi lain Saputra dan Rodiah (2025) dengan menggunakan teori Mohanty melihat kebijakan partisipasi ekonomi perempuan dalam Visi Saudi sebagai instrumen ekonomi dan peningkatan citra internasional yang membatasi otonomi politik perempuan. Sementara Muttaqin et al. (2025) menyoroti integrasi perempuan yang selektif dalam agenda pembangunan ekonomi pasca-minyak sebagai strategi untuk membingkai ulang identitas nasional sebagai negara Islam moderat untuk menarik investasi asing tanpa mengubah tatanan politik otoriter. Meski demikian, sejumlah studi yang ada belum membahas secara spesifik terkait pergeseran representasi perempuan oleh negara yang berimplikasi terhadap otonomi politik perempuan Saudi.

Berbeda dengan literatur yang ada, penelitian ini melihat permasalahan integrasi perempuan dalam Visi Saudi 2030 dengan menggunakan subjektivitas sebagai fokus analisis melalui sudut pandang feminisme pascakolonial Gayatri Spivak (1988). Spivak membantu penelitian ini untuk menyoroti aspek relasi kuasa, agenda pembangunan ekonomi, dan struktur sosial politik yang saling berkelindan mengkonstruksi representasi perempuan Saudi. Representasi perempuan dalam Visi Saudi 2030 sejalan dengan logika kolonial yang berupaya mengontrol perempuan sebagai objek. Spivak (1988) berargumen bahwa subjektivitas subaltern atau kelompok marginal seringkali tidak memiliki posisi yang setara untuk merepresentasikan dirinya sendiri. Analisis Spivak membantu mengisi kekosongan studi yang ada dengan menekankan konsep representasi dan subalternitas untuk memahami bahwa praktik representasi oleh aktor dominan tidak mewakili suara subaltern secara otentik dan berpotensi mendistorsi suara asli subaltern. Pembahasan mengenai subjektivitas perempuan melalui lensa feminisme pascakolonial tidak hanya berbicara tentang apakah perempuan dilibatkan atau tidak, tetapi apakah mereka memiliki ruang untuk merepresentasikan dirinya sendiri dan atas kepentingan siapa mereka direpresentasikan.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis bagaimana Visi Saudi 2030 merekonstruksi subjektivitas perempuan untuk agenda pembangunan pasca-minyak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus tunggal sebagai teknik analisis data. Metode studi kasus dipilih untuk membantu memahami kompleksitas fenomena sosial-politik yang tidak dapat digeneralisir melalui penelitian kuantitatif dengan fokus terhadap satu fenomena (Bennett & Elman, 2007). Adapun data penelitian diperoleh melalui studi pustaka dengan menghimpun data primer berupa dokumen resmi Visi Saudi 2030 dan data sekunder berupa buku, artikel jurnal ilmiah, laporan tahunan Visi Saudi 2030, dan

laporan organisasi internasional, seperti McKinsey Global & Company, World Economic Forum, UN Women, dan Human Rights Watch. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi tidak hanya dalam literatur studi gender dan politik Timur Tengah, tetapi juga dalam memperkaya perspektif studi Hubungan Internasional melalui kajian feminisme pascakolonial.

Feminisme Pascakolonial: Politik Representasi dan Subalternitas Perempuan

Pandangan feminisme pascakolonial yang dirumuskan oleh Gayatri Spivak membantu penelitian ini menganalisis secara kritis bagaimana Visi Saudi 2030 merekonstruksi subjektivitas perempuan dengan melihat siapa saja yang boleh berbicara tentangnya dan apakah capaian kebijakan gender tersebut merupakan bentuk transformasi kebijakan negara yang lebih inklusif atau justru sebagai bentuk opresif baru yang bermutasi dari model kebijakan sebelumnya melalui wacana pembangunan ekonomi dan modernisasi? Feminisme pascakolonial sendiri merupakan salah satu aliran feminisme yang mengkritisi dominasi wacana feminisme Barat dalam memahami pengalaman perempuan di negara Selatan, seperti Arab Saudi. Aliran ini berkembang pada akhir tahun 1980-an hingga 1990-an sebagai respons terhadap asumsi feminis liberal yang menyamaratakan bentuk penindasan yang dihadapi perempuan (Lewis & Mills, 2003). Secara umum, aliran ini memandang bahwa pengalaman perempuan khususnya di negara Selatan tidak hanya dipengaruhi oleh dominasi patriarki lokal, tetapi juga oleh dominasi struktur kolonial dan hegemoni global. Perempuan di negara-negara non-Barat sering direpresentasikan sebagai objek dan korban yang perlu “diselamatkan”, sehingga suara dan agensi mereka sendiri tersingkirkan (Lewis dan Mills, 2003). Oleh karena itu, penting untuk mengakui perempuan negara Selatan sebagai subjek yang memiliki agensi dan kepentingannya sendiri.

Sebagaimana telah disebutkan bahwa praktik representasi perempuan dalam wacana Visi Saudi secara top down berpotensi mendistorsi agensi perempuan. Untuk memahami kondisi ini, Spivak menawarkan kerangka analitis yang ia rumuskan dalam esainya yang berjudul *Can the Subaltern Speak?*. Dalam esainya, salah satu konsep yang ia tawarkan adalah terkait praktik representasi dan subalternitas. Spivak (1988) berargumen bahwa kelompok subaltern seringkali tidak dapat merepresentasikan diri dan berbicara atas kepentingannya sendiri secara setara karena selalu direpresentasikan oleh aktor atau struktur dominan. Akibatnya, ketika representasi atau suara subaltern diangkat oleh sebuah wacana struktur dominan, representasi tersebut perlu dikritisi mendalam tentang kepentingan siapakah yang berbicara di dalam representasi tersebut dan sejauh mana subaltern dapat berbicara atas kepentingannya.

Konsep subaltern sendiri merujuk pada kelompok marginal yang terpinggirkan oleh struktur dominan kolonial dan patriarki (Morris, 2010). Akibatnya mereka tidak memiliki akses setara terhadap produksi pengetahuan maupun pengambilan keputusan. Istilah subaltern diambil dari Antonio Gramsci dan dikembangkan oleh Ranajit Guha yang dimaknai sebagai “mereka yang bukan elit” atau tersubordinasi dalam struktur kekuasaan (Morris, 2010). Kemudian Spivak (1988) mengembangkan konsep ini untuk menunjukkan bahwa kelompok subaltern kerap kehilangan suara otonomnya karena selalu direpresentasikan oleh struktur dominan kolonial, patriarkal, maupun epistemik. Spivak (1988) memandang bahwa perempuan subaltern mengalami penindasan berlapis oleh dominasi patriarki lokal dan kolonial.

Hal ini seperti yang tercermin dalam pengalaman perempuan Saudi. Sebelum Visi Saudi diresmikan, koalisi kerajaan-Wahabisme membentuk tatanan gender konservatif yang menempatkan perempuan Saudi pada posisi subordinat. Tatanan ini mempresentasikan perempuan Saudi sebagai subjek domestik dan mengatur parameter “wanita Islam ideal” melalui kebijakan negara yang didasarkan pada konsep qiwamah dan mahram. Akibatnya perempuan Saudi termarginalisasi dan visibilitasnya dibatasi dalam sektor publik.

Dengan diresmikannya Visi Saudi 2030, representasi perempuan Saudi kemudian bergeser menjadi subjek pembangunan dan aktor ekonomi. Spivak (1988) membantu penelitian ini melihat bahwa praktik representasi tersebut berlangsung secara top down untuk kepentingan negara dan tidak secara otentik berasal dari gerakan akar rumput perempuan Saudi sendiri. Integrasi perempuan dalam partisipasi ekonomi diinstrumentalisasi sebagai upaya negara untuk memenuhi tuntutan model ekonomi baru dengan mengkooptasi otoritas keagamaan Wahabisme dan membatasi subjektivitas politik perempuan Saudi. Selain itu, Spivak (1988) memberikan kerangka untuk melihat bahwa praktik representasi ini tidak secara murni dimaksudkan untuk menciptakan emansipasi gender secara holistik, tetapi untuk kepentingan ekonomi nasional.

Pendekatan feminisme pascakolonial dipilih karena dapat memberikan kerangka analitis dalam menjelaskan konteks struktur patriarki lokal, relasi kuasa global, dan struktur pembangunan ekonomi yang berkelindan mengkonstruksi representasi perempuan di negara Selatan, termasuk Arab Saudi. Meski Arab Saudi secara historis tidak mengalami penjajahan fisik secara langsung, pendekatan teori ini tetap relevan karena proses pembentukan negara modern Saudi mereplika atau mereproduksi logika kolonial melalui konsolidasi kekuatan politik, militer, dan agama yang memungkinkan negara mengatur kehidupan sosial dan subjektivitas warga negaranya (Bass, 2016). Salah satu bentuknya adalah mereproduksi cara mendefinisikan kemajuan dan

pembangunan ekonomi yang disesuaikan dengan standar hegemoni global barat melalui peningkatan produktivitas oleh partisipasi perempuan (Bass, 2016).

Spivak (1988) membantu memahami bahwa Arab Saudi mereproduksi logika kolonial dengan mengontrol perempuan melalui subjektivitas yang menempatkannya sebagai objek dan instrumen produksi. Subjektivitas perempuan dialihkan dari ranah domestik ke ekonomi formal atas dasar kebutuhan ekonomi nasional dan bukan berdasar proyek emansipasi. Dalam konteks ini, perempuan Saudi kini dikontrol tidak hanya melalui struktur konservatisme domestik, tetapi juga oleh konstruksi subjektivitas yang selaras dengan agenda pembangunan pasca-minyak. Dengan demikian, berdasarkan kerangka berpikir Spivak, penelitian ini pertama membahas tentang pembentukan tatanan gender baru sebagai jembatan untuk merepresentasikan perempuan yang menimbulkan kontestasi dengan wahabisme, kedua membahas tentang dominasi negara dalam mengontrol agenda transformasi, dan terakhir membahas tentang subjektivitas perempuan dalam Visi Saudi 2030.

Pembentukan Tatanan Gender Baru: Visi Saudi 2030 sebagai Arena Kontestasi dan Negosiasi

Implementasi Visi Saudi 2030 menuntut negara untuk merestrukturisasi tatanan gender konservatif yang memicu kontestasi antara Kerajaan dan Wahabisme. Pembentukan rezim gender modern Arab Saudi berhubungan erat dengan koalisi historis antara keluarga kerajaan Al-Saud sebagai pemegang otoritas tertinggi dan ulama Wahabi sebagai pemberi legitimasi (Al-Rasheed, 2013). Sejak tahun 1932, Kerajaan Arab Saudi modern berdiri di bawah aliansi strategis antara keduanya dengan memanfaatkan agama sebagai alat kekuasaan dan sumber legitimasi dalam mengatur norma sosial, termasuk relasi gender (Ulya dan Basyar, 2026). Relasi simbiotik diantara keduanya telah membentuk tatanan gender masyarakat Saudi yang hierarkis dan patriarkis untuk menjaga stabilitas politik serta menciptakan masyarakat yang patuh (Dorinde, 2020).

Wahabisme sebagai ideologi religius negara memainkan peran penting dalam membentuk konstruksi gender di Arab Saudi (Muttaqin et al., 2025). Interpretasi konservatif terhadap narasi dan teks agama diinstitusionalisasi melalui sistem pendidikan, hukum keluarga, dan institusi sosial lain yang secara formal mengatur perilaku masyarakat Saudi (Saputra dan Rodiah, 2025). Akibatnya, ketimpangan gender di Arab Saudi terjadi bukan dari hasil reduksi budaya Arab ataupun Islam semata, melainkan strategi politik negara yang menempatkan gender sebagai arena kekuasaan politik (Al-Rasheed, 2013).

Kerajaan secara aktif memproduksi norma maskulinitas untuk mempertahankan otoritas, mengontrol masyarakat, dan menjaga stabilitas politik (Muttaqin et al., 2025). Ketimpangan gender didepolitisasi dan direpresentasikan sebagai pilihan moral dan bukan sebagai masalah politik (Al-Rasheed, 2013). Oleh karena itu, sejak masa pendirinya, relasi antara Kerajaan dan ulama Wahabi memainkan peran sentral dalam membentuk rezim gender di Arab Saudi dengan mengkonstruksi legitimasi kekuasaannya melalui maskulinitas hegemonik.

Doktrin Wahabisme menempatkan perempuan sebagai posisi subordinat yang dilegitimasi secara teologis dan hukum sebagai upaya untuk mengontrol kehidupan publik, termasuk peran dan eksistensi perempuan (Jamilah dan Isnarti, 2024). Wahabisme telah membangun tatanan gender Arab Saudi yang didasarkan pada interpretasi konservatif narasi agama melalui konsep qiwamah dan konsep mahram (Muttaqin et al., 2025). Melalui interpretasi ini, laki-laki diposisikan sebagai pemimpin, pelindung, dan penanggung jawab atas perempuan yang secara normatif memperkuat legitimasi otoritas laki-laki dalam relasi gender. Kedua konsep ini kemudian berkembang menjadi praktik sosial yang membatasi mobilisasi perempuan melalui sistem perwalian laki-laki, segregasi gender di ruang publik, pembagian domestik yang ketat, serta pembatasan partisipasi dan otonomi perempuan di berbagai ranah kehidupan sosial (Muttaqin et al., 2025).

Wahabisme di Arab Saudi tidak hanya berfungsi sebagai keyakinan dan identitas nasional, tetapi juga sebagai alat kontrol sosial dalam membentuk kebijakan dan norma gender yang membatasi peran perempuan Saudi melalui interpretasi konservatif terhadap hukum syariat (Saputra dan Rodiah, 2025). Kerajaan secara aktif memproduksi kebijakan gender yang dapat mempertahankan hierarki gender dengan menjadikan laki-laki sebagai pusat otoritas politik dan sosial, sementara perempuan diposisikan sebagai simbol kehormatan nasional dan penjaga moral masyarakat (Al-Rasheed, 2013). Melalui interpretasi konservatif yang dilembagakan dalam struktur negara, Arab Saudi mempromosikan dan mempresentasikan perempuan Saudi sebagai “wanita Islami ideal” yang memiliki tugas penting dalam melindungi nilai-nilai tradisional dan moralitas Islam dalam keluarga (Dorinde, 2020). Namun, pola dan struktur dalam tatanan gender ini tidak selalu bersifat statis, melainkan dinamis terhadap perubahan kepentingan Kerajaan dan sering kali dijadikan arena negosiasi antara kerajaan, ulama, tekanan global, dan kebutuhan ekonomi nasional.

Seiring berjalan waktu, koalisi bersama ulama Wahabi menjadi tantangan dan hambatan dalam mendukung implementasi Visi Saudi 2030 karena transformasi ekonomi pasca-minyak menuntut Kerajaan Arab Saudi merekonstruksi struktur sosial yang kontras dengan ajaran Wahabisme (Ulya dan Basyar, 2026). Krisis ekonomi

nasional Arab Saudi pada tahun 2014 menunjukkan kerentanan struktur ekonomi rentier sehingga menuntut transformasi model ekonomi baru. Meski negara rentier tersebut telah bertahun-tahun menghadapi fluktuasi harga minyak yang dinamis, akan tetapi pada tahun 2014, penurunan harga minyak global menurun secara drastis dari \$112 per barel di bulan Juni 2014 menjadi \$59 per barel di bulan Desember 2014 (Jawadi and Ftiti, 2019). Hingga Januari 2016, harga minyak mencapai rekor terendahnya sebesar US\$28 (Grand dan Wolff 2020, 4).

Volatilitas harga minyak tersebut salah satu faktornya dipicu oleh revolusi shale oil yang mempengaruhi penawaran minyak global dan struktur pasar energi global. Revolusi shale oil telah meningkatkan pasokan cadangan minyak Amerika Serikat sebagai importir minyak terbesar dunia melalui teknologi hydraulic fracturing untuk mengekstraksi minyak dari batuan serpih (Ansari, 2017). Akibatnya, ketergantungan global terhadap minyak negara Teluk, termasuk Arab Saudi berkurang secara signifikan. Oversupply minyak Arab Saudi diperumit dengan pertumbuhan ekonomi Cina dan negara-negara Eropa sebagai importir minyak yang melambat sehingga menekan volatilitas harga minyak secara berkelanjutan (Ansari, 2017).

Ketergantungan minyak di tengah krisis ekonomi juga telah menjadikan Arab Saudi “terbelakang” dari negara Teluk lain yang telah terlebih dahulu mendiversifikasi ekonominya, seperti Uni Emirat Arab dan Qatar. Hal ini menekan kompetisi ekonomi Arab Saudi untuk mempertahankan kekuatan posisinya di kawasan Teluk melalui liberalisasi ekonomi dan reformasi sosial yang kompatibel dengan logika pasar global (Al Naimi, 2021).

Di sisi lain, Arab Saudi diperkirakan akan menghadapi ledakan populasi muda pada tahun 2030 yang menuntut penciptaan lapangan kerja dalam skala besar (McKinsey Global & Company, 2015). Sementara itu, sektor minyak sebagai penyerap utama tenaga kerja sudah tidak bisa lagi memenuhi kebutuhan itu di tengah krisis ekonomi nasional (Ansari, 2017). Akibatnya, penurunan tingkat produktivitas dan pengangguran di Arab Saudi akan terus meningkat. Jika tidak ditangani langsung, krisis ekonomi dan tingkat pengangguran yang tinggi dapat mengancam stabilitas sosial dan politik Kerajaan, seperti yang terjadi dalam fenomena Arab Spring (Al Naimi, 2021). Untuk merespon semua krisis ini di bawah kepemimpinan MBS, Visi Saudi 2030 diresmikan dengan mengusung 3 pilar utama, yaitu masyarakat dinamis (A vibrant society), perekonomian yang berkembang (A thriving economy), dan bangsa yang ambisius (An ambitious nation) (Saudi Vision 2030, 2016).

Berbeda dengan negara-negara Teluk yang lebih dahulu mendiversifikasi ekonomi, Arab Saudi terjebak dalam menghadapi hambatan struktural sosialnya yang

konservatif (Ulya dan Basyar, 2026). Reformasi ekonomi Arab Saudi memiliki cakupan yang lebih luas dengan tidak hanya mentransformasi model ekonomi yang berkelanjutan, tetapi juga mentransformasi kehidupan sosial masyarakatnya yang telah “dikompromikan” dengan sekutunya, ulama Wahabi. Salah satu implikasi dari transformasi ini adalah rekonstruksi tatanan gender konservatif. Selama puluhan tahun, ekonomi Arab Saudi bertumpu pada satu fondasi, yaitu model kemakmuran berbasis minyak yang kompatibel dengan struktur konservatisme gender (Topal, 2019). Pendapatan minyak cukup membiayai subsidi warga negara Saudi yang digunakan sebagai kontrak sosial untuk menarik kepatuhan masyarakat (Al Naimi, 2021). Akibatnya, tidak ada tekanan ekonomi bagi perempuan untuk masuk pasar kerja dan partisipasinya dibatasi sebagai bentuk norma moral dalam sistem Wahabisme. Ketika model ekonomi rentier tidak lagi layak, konservatisme gender juga tidak lagi relevan secara ekonomi (Topal, 2019).

Salah satu upaya transformasi ekonomi Arab Saudi adalah dengan meningkatkan produktivitas ekonomi melalui partisipasi tenaga kerja perempuan (McKinsey Global & Company, 2015). Peningkatan partisipasi perempuan dalam pasar kerja dinilai sebagai sumber daya ekonomi yang belum dimanfaatkan secara optimal (Topal, 2019). Visi Saudi 2030 secara eksplisit menargetkan 30 % partisipasi tenaga kerja perempuan pada tahun 2030 (Saudi Vision 2030, 2016). Kebijakan-kebijakan yang mendukung realisasi target ini mulai diberlakukan seperti pencabutan larangan mengemudi bagi perempuan pada Juni 2018, pelonggaran sistem mahram bagi perempuan berumur 21 tahun, perluasan akses pendidikan serta pelatihan vokasional, dan pembukaan sektor-sektor publik untuk ketenagakerjaan perempuan, seperti perhotelan, hiburan, olahraga, dan pariwisata (Topal, 2019; Mufiedah et al., 2020). Perubahan-perubahan ini sangat kontras dengan rezim gender yang sebelumnya dikonstruksi dengan ulama Wahabi dan memicu kontestasi antara negara dan agama.

Implementasi Visi Saudi 2030 menghadapi dilema karena kebutuhan modernisasi ekonomi memaksa Kerajaan merekonstruksi struktur konservatif rezim gender dominan yang telah lama dilegitimasi Wahabisme (Ulya dan Basyar, 2026). Akibatnya, dalam merumuskan kebijakan pembangunan pasca-minyak, Kerajaan perlu menegosiasikan ulang batas-batas norma sosial dengan merekonfigurasi relasi baru tanpa sepenuhnya menghapus pengaruh ulama Wahabi (Ulya dan Basyar, 2026).

Transformasi sosial yang mesti dilakukan untuk mendukung proyek pembangunan pasca-minyak berpotensi mengganggu struktur sosial dan tatanan gender yang selama puluhan tahun dikonstruksi oleh doktrin Wahabisme dalam menopang stabilitas politik. Tidak sedikit dari kelompok ulama konservatisme seperti Salman Al-Awda dan Hassan Farhan Al-Maliki yang mengkritik transformasi sosial

sebagai ancaman terhadap peran sentral Islam dalam kehidupan masyarakat Saudi (Ulya dan Basyar, 2026). MBS menavigasi kontestasi ini dengan membatasi pengaruh ulama konservatif secara bertahap dalam mengatur dan mengontrol kehidupan sosial masyarakat Saudi. MBS menerapkan pendekatan carrot and stick atau hadiah dan hukuman untuk mengendalikan resistensi ulama (Ulya dan Basyar, 2026).

Melalui pendekatan ini, MBS meminggirkan atau menangkap ulama yang berbeda pendapat dan mendukung ulama moderat yang selaras dengan kebijakan Kerajaan (Ulya dan Basyar, 2026). Dengan memframing modernisasi sebagai kebutuhan stabilisasi ekonomi, MBS berupaya meredam resistensi sekutunya dan merepresentasi Visi Saudi 2030 sebagai kepentingan nasional, bukan sebagai ancaman terhadap nilai agama (Saikuddin dan Amrullah, 2023). Dalam sudut pandang ulama Wahabi, dukungan terhadap transformasi sosial baru didasarkan pada prinsip ta'at wali amr sebagai konsekuensi dari interpretasinya sendiri, yang berarti patuh dan setia terhadap kebijakan penguasa (Muttaqin et al., 2025). Dalam mendukung realisasi Visi Saudi 2030, Kerajaan menggunakan narasi "Islam Moderat" yang kompatibel dengan modernisasi, sehingga perubahan sosial yang terjadi tidak dipersepsikan sebagai sekuritas yang radikal (Dorinde, 2020).

Dinamika ini menunjukkan adanya pergeseran relasi kuasa antara Kerajaan dengan ulama yang tidak selalu stabil. Sebagai bentuk negosiasi atas koalisi historisnya, negara tetap mempertahankan legitimasi ideologi Wahabisme sebagai strategi stabilitas politik, tetapi menjadi aktor sentral dalam menentukan arah reformasi ekonomi dan transformasi sosial untuk kepentingan pembangunan nasional (Ulya dan Basyar, 2026). Transformasi sosial dibingkai sebagai kebutuhan nasional yang tetap dikontrol dalam batasan nilai dan norma agama, sehingga dapat diterima tanpa memicu resistensi ulama (Vasinton, 2020).

Kontestasi antara Kerajaan dan ulama Wahabi menunjukkan adanya pergeseran otoritas serta peran ulama terhadap tatanan sosial Arab Saudi. Implementasi Visi Saudi 2030 mendekonstruksi dominasi ideologi Wahabisme dengan meredefinisikan posisi Wahabisme dalam struktur negara modern Saudi. Hal ini diperkuat dengan pernyataan MBS dalam wawancaranya bersama jurnalis Abdallah Al-Mudaifer (Coptic Solidarity, 2021). MBS menolak klaim Arab Saudi sebagai "negara Wahabi" dan membuka ruang interpretasi lain, seperti penalaran independen atau ijtihad dalam penafsiran narasi agama (Coptic Solidarity, 2021). Dalam pernyataan lain, MBS menyebut bahwa Muhammad bin Abdul Wahhab sebagai pendiri ideologi Wahabisme bukanlah nabi sehingga ajarannya tidak dapat dianggap sebagai satu-satunya otoritas absolut yang mengikat negara (CNN Indonesia, 2024).

Dengan menata ulang bentuk kontrol negara melalui redefinisi peran ulama, penelitian ini menilai Arab Saudi merestrukturisasi rezim gender untuk mendukung pembangunan pasca-minyak secara top down tanpa sepenuhnya melepas kontrol sosial yang telah lama menjadi pondasi stabilitas politiknya. Angka 30 % pada target partisipasi perempuan merupakan angka kalkulasi ekonomi yang dapat menjembatani kebutuhan transformasi ekonomi. Berdasarkan laporan McKinsey Global & Company (2015), angka ini adalah target minimal yang mesti dicapai untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, sejalan dengan analisis Spivak penelitian ini melihat bahwa kebijakan-kebijakan tersebut tidak berorientasi untuk pengembangan diri perempuan secara holistik dan berasal dari tuntutan perempuan, tetapi sebagai modal untuk kebutuhan transformasi ekonomi yang menempatkan perempuan sebagai instrumen produksi.

Penelitian ini berargumen bahwa pengurangan kontrol ulama Wahabi memperkuat kontrol kerajaan atas perubahan politik dan sosial masyarakat untuk kepentingan pembangunan ekonomi. Sebuah upaya yang dilihat oleh kacamata Spivak sebagai bentuk dominasi negara dalam merestrukturisasi tatanan gender untuk merekonstruksi subjektivitas perempuan yang berpotensi meminggirkan suara perempuan sebagai subjek politik. Visi Saudi 2030 menjadi katalis perubahan yang mendorong erosi koalisi tradisional antara negara dan otoritas agama, sekaligus membentuk kontrol sosial baru yang bermutasi dari bentuk kooptasi lama dan semakin terpusat pada negara. Dengan demikian, transformasi yang direkonstruksi Vision 2030 mencerminkan serangkaian proses dan hasil negosiasi antara negara dengan agama dalam membentuk rezim gender baru untuk kepentingan modernisasi ekonomi nasional.

Reformasi tanpa Demokratisasi : Dominasi Negara dalam Transformasi Gender

Transformasi gender dalam Visi Saud 2030 mencerminkan ambiguitas antara perluasan visibilitas perempuan dalam sektor ekonomi dan penguatan dominasi kontrol negara atas ruang politik perempuan. Proyek pembangunan ekonomi Visi Saudi 2030 menjadi momentum penting dalam mentransformasi tatanan gender Arab Saudi yang sebelumnya didominasi oleh struktur konservatisme agama. Kebijakan-kebijakan konservatif yang sebelumnya menghambat mobilitas dan visibilitas perempuan Saudi mulai dilonggarkan. Tujuannya tidak lain adalah untuk menyelaraskan struktur sosialnya dengan model ekonomi pasca-minyak yang dibangun oleh logika modernisasi dan transformasi perempuan sebagai instrumen produksi (Croghan, 2024).

Model baru ini memungkinkan Arab Saudi untuk mendiversifikasi ekonominya dengan meningkatkan produktivitas ekonomi nasional melalui optimalisasi potensi tenaga kerja perempuan (El-Bakr, 2022). Peningkatan angka kerja perempuan dinilai sebagai strategi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan mengintegrasikan ekonomi nasional menuju pasar multinasional serta menarik investasi global (El-Komy, 2024). Untuk merealisasikan visi ini, Arab Saudi kemudian secara bertahap memfasilitasi aksesibilitas perempuan terhadap sektor ekonomi publik. Pada tahun 2016 sejak Visi Saudi 2030 diluncurkan, Arab Saudi secara ambisius menargetkan 30% peningkatan partisipasi kerja perempuan di tahun 2030 atau sebesar dua kali lipat dari capaian awalnya di tahun 2016 sebesar 17% (Narayanan, 2024). Menariknya di tahun 2024, angka target ini kemudian ditingkatkan mencapai 40% karena angka ini melampaui angka targetnya mencapai 36% (Saudi Vision 2030, 2024).

Peningkatan angka kerja perempuan memang membuka lebih besar visibilitas perempuan Saudi di sektor publik yang sebelumnya dibatasi oleh struktur konservatif (El-Bakr, 2022). Namun apabila ditinjau lebih kritis, penelitian ini melihat perubahan tersebut tidak diikuti dengan semangat emansipasi gender yang berasal dari suara perempuan Saudi secara otonom ataupun terorganisir. Spivak (1988) membantu penelitian ini dengan melihat bahwa Arab Saudi melalui integrasi perempuan ke dalam agenda transformasi pembangunan pasca-minyak justru telah mereproduksi logika kolonial untuk mengontrol perempuan dengan menjadikan perempuan sebagai objek kebijakan dan instrumen produksi.

Beberapa institusi global telah menyoroti capaian gender dalam wacana Visi Saudi 2030 secara optimis sebagai sebuah “keberhasilan” yang bersejarah bagi Arab Saudi. Misalnya dalam Indeks Kesenjangan Gender Global 2025, Arab Saudi menempati posisi ke 132 dari 146 negara dan posisi ketujuh di kawasan MENA (Rampal, 2022). Berdasarkan laporan ini, Arab Saudi termasuk diantara negara-negara yang memiliki perkembangan ekonomi yang pesat, terutama dalam partisipasi perempuan dalam ekonomi (Akeel, 2025). Di tahun yang sama, data UN Women (2026) juga menunjukkan indeks kesenjangan gender Arab Saudi yang telah menutupi kesenjangan gender secara menyeluruh sebesar 64%, dengan kesetaraan tertinggi di aspek pendidikan sebesar 98%, kesehatan sebesar 96%, dan ekonomi sebesar 52%. Menurut World Economic Forum (2025), keberhasilan utama Arab Saudi dalam mencapai angka ini tidak lain berasal dari penekanan angka pengangguran yang diatasi dengan peningkatan partisipasi dan peluang perempuan yang meningkat secara signifikan seperti dalam tabel di bawah ini.



Gambar 1.1

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Arab Saudi (2015–2025)

Sumber: General Authority for Statistics

Namun, penelitian ini tidak hanya melihat kesetaraan dan keadilan gender hanya dari angka, tetapi juga realitas sosial yang menyertainya. Selebrasi terhadap capaian gender Arab Saudi seringkali mengaburkan fakta bahwa hal tersebut didorong oleh kepentingan ekonomi dan bukan intensi untuk menciptakan kesetaraan gender secara holistik. Visi Saudi 2030 lahir sebagai respon dan strategi atas kerentanan struktur ekonomi kerajaan yang mendorong diversifikasi ekonomi nasional pasca-minyak (Mufiedah et al., 2020). Transformasi gender merupakan bagian integral dari strategi ini karena perempuan dinilai sebagai sumber daya ekonomi yang belum dimanfaatkan secara optimal (Ainurrofiq dan Khasanah, 2024). Mengingat 50% lulusan universitas di Arab Saudi adalah perempuan, partisipasi ekonomi perempuan dalam hal ini direalisasikan untuk menekan angka pengangguran dan membuka peluang ekonomi baru (Saudi Vision 2030, 2016). Perempuan Saudi dipandang sebagai great asset yang dapat mendorong modernisasi ekonomi dan menyelaraskan model ekonomi nasional dengan standar pasar global (Saudi Vision 2030, 2016). Arab Saudi dalam cetak biru ambisinya tersebut mengintegrasikan sejumlah kebijakan ini di salah satu pilar visi yaitu, thriving economy, ketimbang memosisikannya di pilar dynamic society sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat.

Penelitian ini memandang bahwa integrasi perempuan dalam pasar tenaga kerja telah mencerminkan reproduksi logika kolonial Arab Saudi yang menjadikan perempuan Saudi sebagai objek kebijakan dan kelompok yang perlu diberdayakan untuk kebutuhan ekonomi nasional. Hal ini didukung oleh data studi Council on Foreign Relations (2025) yang menyatakan bahwa mengatasi kesenjangan gender dalam angkatan kerja dapat memberikan nilai tambah yang substansial bagi perekonomian global khususnya di kawasan MENA dengan menghasilkan PDB sebesar \$2,7 triliun pada tahun 2025. Melalui angka ini PDB Kerajaan dapat bertambah sekitar 50% (Council on Foreign Relations, 2025). Proyeksi ini menekankan manfaat ekonomi yang substansial dari integrasi perempuan ke dalam angkatan kerja dan kontribusi pembangunan ekonomi nasional (Council on Foreign Relations, 2025). Oleh karena itu, meski angka ini berkontribusi dalam meningkatkan kesetaraan gender dalam beberapa aspek, namun tidak dapat dipungkiri bahwa dalam implementasinya didorong oleh rasionalitas ekonomi dengan tujuan untuk mempercepat strategi ekonomi Arab Saudi menuju pembangunan ekonomi pasca-minyak. Penelitian ini melihat peningkatan partisipasi tenaga kerja perempuan sebagai konsekuensi negara untuk beradaptasi menyesuaikan struktur sosial konservatifnya dengan kebutuhan transformasi ekonomi pasca-minyak.

Capaian keberhasilan proyek pembangunan ekonomi tersebut secara optimis dipandang oleh beberapa studi sebagai sebuah democratic moment yang berpotensi membuka jalan bagi demokratisasi sosial dan liberalisasi gender masyarakat Saudi yang sebelumnya didominasi struktur konservatif (Ainurrofiq dan Khasanah, 2024). Arab Saudi telah menarik perhatian komunitas internasional karena pada akhirnya negara maskulin tersebut berhasil meningkatkan indeks gender global yang secara bertahap mengakhiri sejarah kelim ketimpangan gendernya. Namun, penelitian ini menolak pandangan tersebut dan justru melihatnya sebagai transformasi kontrol negara dari dominasi struktur konservatisme agama menjadi dominasi wacana pembangunan ekonomi pasca-minyak. Apabila dilihat melalui analisis Spivak, capaian gender tersebut bersifat selektif dan terkontrol secara terpusat oleh dominasi kekuasaan Kerajaan.

Keberhasilan diversifikasi ekonomi Saudi melalui transformasi sosial yang modern tidak terlepas dari hasil negosiasi dan kompromi antara kerajaan dengan ulama Wahabi. Melalui konfrontasi di antara keduanya, Arab Saudi telah merekonstruksi bentuk tatanan gender Arab Saudi baru yang lebih longgar dan terpusat oleh otoritasnya (Saikuddin dan Amrullah, 2023). Penelitian ini juga melihat capaian gender sebagai reposisi peran ulama Wahabi dalam rezim gender Arab Saudi yang mulai tergeser oleh dominasi kekuasaan Kerajaan. Para ulama Wahabi secara bertahap melegitimasi kebijakan-kebijakan kerajaan yang mendukung proyek pembangunan dengan tetap berada di batas doktrin Wahabisme (Ulya dan Basyar, 2026).

Nampak dari permukaan, semestinya fenomena ini menjadi momentum penting dalam menciptakan kesetaraan dan keadilan gender di Arab Saudi yang sebelumnya dikontrol penuh oleh doktrin Wahabisme. Namun, hal ini berbeda dengan realitas di baliknya. Dalam merealisasikan Visi Saudi 2030, Arab Saudi memang mengkooptasi ulama Wahabi untuk mengurangi pengaruhnya dalam mengontrol kehidupan sosial masyarakat Saudi dan melegitimasi peningkatan visibilitas perempuan di sektor publik, tetapi tidak secara serius melibatkan perempuan sebagai aktor politik dalam proses modernisasi ekonomi untuk menciptakan perubahan sosial yang inklusif (Eum, 2019). Akibatnya, capaian gender dalam Visi Saudi 2030 dinilai ambigu karena Arab Saudi dipandang berupaya untuk memonopoli kekuasaannya atas transformasi gender tanpa melibatkan perempuan sebagai agensi sentral yang berperan di dalamnya.

Hal ini didasari oleh banyaknya para aktivis reformasi dan hak perempuan yang menghadapi aksi represif oleh negara (Human Rights Watch, 2018). Implementasi Visi Saudi 2030 tidak hanya ditekan oleh para ulama konservatif yang memandang transformasi bertentangan dengan nilai sosial yang telah mereka bentuk, tetapi juga oleh para aktivis perempuan yang melihat transformasi di dalamnya tidak secara inklusif memenuhi kepentingan perempuan Saudi (Topal, 2019). Dan sebagaimana yang telah dilakukan terhadap para ulama pemberontak, MBS menerapkan pola pendekatan “hadiah dan hukuman” terhadap para aktivis perempuan untuk mengontrol stabilitas sosial (Cerioli, 2019).

Meski liberalisasi sosial mulai didorong oleh kerajaan, namun liberalisasi politik dan partisipasi politik masyarakat tetap dikontrol secara ketat (Cerioli, 2019). Hal ini dijustifikasi oleh penangkapan terhadap 11 aktivis perempuan yang terlibat dalam aksi Women2Drive beberapa minggu setelah pencabutan kebijakan pelarangan mengemudi bagi perempuan pada tahun 2018 (Topal, 2019). Otoritas Saudi mengkonstruksi narasi pencemaran nama baik untuk mendiskreditkan pekerjaan para pembela hak perempuan dengan melabeli mereka sebagai “pengkhianat” (Human Rights Watch, 2018).

Penelitian ini memandang bahwa penangkapan dan bentuk represif ini memberi sinyal bahwa transformasi yang dijalankan kerajaan mesti dilakukan sesuai dengan parameter yang telah ditentukan oleh negara dan bukan sebagai hasil dari negosiasi ataupun keterlibatan perempuan dalam perumusan kebijakan. Aksi represif tersebut dinilai sebagai upaya negara untuk mengontrol suara dan memonopoli representasi perempuan Saudi dengan membatasi ruang politik perempuan yang berpotensi mendistorsi agensi perempuan Saudi. Visi Saudi 2030 di satu sisi membuka akses terhadap visibilitas perempuan dalam ekonomi dan di sisi lain menutup rapat ruang partisipasi politik perempuan sehingga memperkuat dominasi kontrol politik (Teckchandani dan Dhingra, 2025). Dalam kerangka Spivak, fenomena ini menunjukkan

bahwa Visi Saudi 2030 bukan hanya sebuah transformasi ekonomi dan sosial Arab Saudi melainkan mutasi bentuk kooptasi lama sebagai alat kontrol negara baru yang diperkuat melalui rekonfigurasi relasi kuasa antara kerajaan, ulama Wahabi, dan agensi perempuan dengan satu tujuan sentral, yaitu kepentingan pembangun ekonom pasca-minyak.

Oleh karena itu, sejalan dengan analisis Spivak (1988), transformasi gender dalam cetak biru Arab Saudi tidak lantas bisa disebut sebagai sebuah reformasi gender karena pada hakikatnya perumusan kebijakan tersebut tidak disertai partisipasi masyarakat yang lebih luas, khususnya perempuan, sebagai subjek politik otonom. Penelitian ini menilai capaian gender dan capaian angka keberhasilan Visi Saudi 2030 dipandang sebagai *democratic moment* yang gagal dalam memberikan peluang kesetaraan terhadap perempuan. Hal ini dikarenakan tidak terdapat distribusi kekuasaan sosial dan partisipasi otonom dari masyarakat secara luas dalam proses perumusan kebijakannya (Htun dan Weldon, 2018). Penelitian ini berargumen bahwa kerajaan berperan sebagai aktor tunggal yang mendominasi wacana pembangunan nasional dengan menekan pengaruh ulama Wahabi dan membatasi mobilitas sosial. Capaian gender diinstrumentalisasi sebagai alat produksi untuk mencapai kepentingan ekonomi dan politik Kerajaan. Alih-alih menciptakan ruang bagi keadilan gender, Arab Saudi merumuskan kebijakan gender melalui pendekatan *top down* yang secara absolut dikendalikan dan diinisiasi oleh negara secara terpusat.

Instrumentalisasi kebijakan perempuan bukanlah sebuah produk baru, terutama di kawasan Timur Tengah. Sama seperti negara Timur Tengah lainnya, Arab Saudi menjadikan isu perempuan sebagai instrumen negara untuk memperkuat legitimasi politik dan membangun citra positif di mata komunitas internasional, tanpa secara fundamental mengubah struktur otoritarianisme yang menopang kekuasaan politik (Tripp, 2019). Reformasi gender memiliki peranan penting dalam diskursus global tentang pembangunan dan hak asasi manusia yang seringkali menjadi bagian dari strategi negara untuk beradaptasi dalam sistem ekonomi global yang kompetitif (El-Komy, 2024). Dengan demikian, transformasi gender dinilai sebagai konsekuensi instrumental atas tantangan penyesuaian struktur sosial terhadap kebutuhan model pembangunan ekonomi pasca-minyak, bukan sebagai intensi murni dalam membongkar struktur patriarkis lama.

Subjektivitas Perempuan dalam Visi Saudi 2030: Penguatan Kontrol Negara di bawah Slogan Pembebasan Perempuan

Visi Saudi 2030 merekonstruksi subjektivitas perempuan melalui mekanisme representasi yang memperkuat kontrol negara dalam bentuk yang lebih modern dan terselubung. Melalui Visi Saudi 2030, Arab Saudi sebagai aktor dominan tidak hanya mengubah arah kebijakan ekonomi, tetapi juga mengubah cara perempuan Saudi didefinisikan dan dimaknai oleh negara. Arab Saudi merepresentasikan perempuan dari subjek domestik menuju subjek pembangunan (Jamilah dan Isnarti, 2024). Transformasi gender dalam Visi Saudi 2030 telah mengkonstruksi rezim gender baru dalam tatanan sosial masyarakat Saudi dan mengubah beberapa struktur konservatif yang sebelumnya membatasi eksistensi perempuan di sektor publik (El-Bakr, 2022). Perempuan Saudi didorong dapat berperan di sektor publik serta berkontribusi dalam agenda diversifikasi ekonomi nasional (Hudhayri, 2021). Perubahan ini mencerminkan adanya pembentukan kembali identitas serta peran perempuan yang dianggap ideal untuk agenda pembangunan pasca-minyak melalui pergeseran atau rekonstruksi subjektivitas.

Melalui pemikiran Spivak (1988), penelitian ini melihat Visi Saudi 2030 beroperasi dalam struktur logika kolonial yang menempatkan perempuan sebagai objek dan instrumen produksi dengan mengontrol perempuan melalui rekonstruksi subjektivitas. Perempuan terutama di negara Selatan, termasuk Arab Saudi seringkali direpresentasikan oleh wacana kebijakan elite politik (Lewis dan Mills, 2003). Alih-alih mengartikulasikan pengalaman dan aspirasi mereka sendiri, perempuan negara Selatan cenderung diposisikan sebagai objek kebijakan negara. Mereka seringkali dikelompokkan sebagai objek yang perlu “diselamatkan” atau “diberdayakan” ke dalam agenda pembangunan, tanpa secara substansial memberikan ruang bagi mereka dalam proses perumusan kebijakan (Saputra dan Rodiah, 2025). Oleh karena itu, capaian angka formal seperti peningkatan partisipasi perempuan seringkali mengalihkan aspek yang mendasar, yaitu apakah perempuan itu sendiri memiliki kapasitas setara untuk mendefinisikan dan menentukan arah kepentingannya sendiri.

Melalui subjektivitas, perempuan memaknai dan memposisikan dirinya sebagai agen yang memiliki kehendak dan kemampuan untuk menentukan pilihannya secara otonom dalam masyarakat (Lewis dan Mills, 2003). Akan tetapi, konstruksi terhadap subjektivitas sendiri tidak terbentuk secara spontan, melainkan dipengaruhi oleh proses sosial, politik, dan diskursif yang membentuk bagaimana seorang individu diposisikan dalam struktur masyarakat (Lewis dan Mills, 2003).

Dalam konteks Arab Saudi, penelitian ini melihat subjektivitas perempuan setidaknya dibentuk melalui tiga mekanisme utama yang saling berkaitan. Pertama,

Arab Saudi dalam rezim gender baru telah mengubah subjektivitas perempuan dan bagaimana mereka direpresentasikan melalui wacana pembangunan ekonomi pasca-minyak yang secara aktif diproduksi negara melalui dokumen resmi Visi Saudi 2030, narasi negara, dan media massa. Kerajaan mendefinisikan “perempuan Saudi ideal” dengan menggeser subjektivitas perempuan Saudi dari “wanita Islami ideal” sebagai subjek domestik menjadi “perempuan Saudi modern” sebagai subjek pembangunan (Hudhayri, 2021). Sebelumnya dalam tatanan gender konservatif, kerajaan merepresentasikan perempuan Saudi sebagai penjaga moralitas dan simbol identitas nasional yang religius (Saikuddin dan Amrullah, 2023).

Subjektivitas perempuan dilegitimasi oleh koalisi negara dan otoritas agama yang memposisikan perempuan sebagai subjek domestik yang dibatasi secara normatif terhadap sektor publik (Muttaqin et al., 2025). Keterlibatan perempuan di sektor publik diklaim berpotensi mengganggu tatanan sosial yang dianggap ideal (Al-Rasheed, 2013). Setelah Visi Saudi dicetuskan, kerajaan menyesuaikan subjektivitas perempuan agar selaras dengan model ekonomi Saudi yang baru (Eum, 2019). Perempuan Saudi direpresentasikan sebagai subjek pembangunan, aktor ekonomi, dan simbol modernisasi yang diharapkan dapat berkontribusi dalam agenda diversifikasi ekonomi pasca-minyak (Afzal dan Omar, 2021). Subjektivitas perempuan pada saat ini dilegitimasi oleh wacana pembangunan dan proyek modernisasi negara yang memperluas visibilitas perempuan di sektor publik (Muttaqin et al., 2025). Melalui produksi wacana pembangunan, kerajaan mengintegrasikan perempuan ke dalam sektor ekonomi sebagai indikator kemajuan nasional dan menentukan bagaimana perempuan diposisikan dalam proses tersebut.

Kedua, subjektivitas perempuan Saudi terbentuk melalui institusionalisasi kebijakan yang membuka peluang perempuan untuk berkontribusi dalam agenda pembangunan pasca-minyak. Arab Saudi melonggarkan kebijakan terkait perempuan yang sebelumnya dibatasi oleh rezim gender konservatif (El-Bakr, 2022). Kerajaan menggunakan narasi Islam moderat dalam menjembatani nilai dan norma gender konservatif yang bertentangan dengan kebutuhan pembangunan ekonomi dan modernisasi (Ulya dan Basyar, 2026). Arab Saudi menekankan bahwa kebijakan transformasi gender tidak bertentangan dengan Islam, tetapi justru sejalan dengan interpretasi Islam yang lebih moderat (Muttaqin et al., 2025).

Institusionalisasi kebijakan gender dalam Visi Saudi 2030 berfungsi meningkatkan visibilitas perempuan di sektor publik dengan memperluas akses perempuan terhadap partisipasi pekerjaan, pendidikan, hiburan, dan olahraga yang sesuai dengan model struktur ekonomi baru (Topal, 2019). Kebijakan gender baru tersebut memang membuka peluang bagi partisipasi perempuan di sektor ekonomi,

tetapi tetap tidak mengubah realitas posisi perempuan sebagai objek kebijakan (Cerioli, 2019). Perempuan Saudi baik dalam tatanan konservatif atau pun dalam tatanan gender modern tetap ditempatkan dalam posisi subordinat sebagai objek kebijakan, dan bukan sebagai subjek politik yang secara otonom menentukan arah perubahan kebijakan.

Penelitian ini memandang bahwa institusionalisasi isu gender dalam kebijakan pembangunan ekonomi modern berpotensi membentuk subjektivitas perempuan dengan menempatkannya sebagai instrumen produksi yang sejalan dengan kepentingan negara. Melalui proses ini, kerajaan mengarahkan bentuk partisipasi perempuan yang dianggap sah dan ideal untuk agenda pembangunan ekonomi pasca-minyak yang tidak sesuai dengan keberagaman pengalaman perempuan lokal.

Ketiga, konstruksi subjektivitas perempuan juga berlangsung melalui pengontrolan ruang politik yang membatasi otoritas politik otonomi perempuan Saudi dalam transformasi gender Visi Saudi 2030. Meski kerajaan mengklaim perempuan Saudi dilibatkan dalam wacana pembangunan ekonomi baru, akan tetapi partisipasi dan suara perempuan dalam proses transformasi tersebut dikontrol oleh negara (Eum, 2019). Gerakan perempuan mendapat tekanan keras dalam mempromosikan dan melindungi hak-hak perempuan (Cerioli, 2019).

Di saat masyarakat Saudi menganggap tuntutan mereka terhadap kebijakan pelarangan mengemudi bagi perempuan berhasil, MBS menangkap dan mengkriminalisasi 11 aktivis yang terlibat dalam kampanye Women2Drive termasuk Manal Al-Sharif sebagai pelopor, dalam beberapa minggu setelah pencabutan pelarangan tersebut diberlakukan (Human Rights Watch, 2018). Komunikasi mereka terhadap dunia luar diputus dan mereka tidak diizinkan memperoleh pendampingan hukum ataupun pengacara (Human Rights Watch, 2018).

Organisasi masyarakat sipil setelah adanya transformasi sosial tetap diawasi ketat dan dibubarkan apabila dianggap bertentangan dengan syariah, moral publik, dan mengancam stabilitas nasional (Topal, 2019). Akibatnya, inisiatif politik perempuan yang bersifat otonom seringkali menghadapi hambatan administratif maupun hukum. Kondisi ini menciptakan iklim politik yang membatasi ekspresi serta mobilitas kolektif perempuan di luar kendali negara (Hoza, 2019). Peningkatan visibilitas perempuan dalam sektor publik tidak serta merta menjadikan mereka sebagai subjek politik otonom yang dapat menentukan sendiri kepentingannya secara setara (Topal, 2019). Kerajaan mengintegrasikan perempuan ke dalam kebijakan ekonomi, tetapi ruang partisipasi politik mereka tetap dikontrol (Cerioli, 2019).

Penelitian ini memandang ketiga mekanisme ini menimbulkan ambiguitas terhadap transformasi gender dalam Visi Saudi 2030. Dalam satu sisi, Arab Saudi secara

positif mereproduksi representasi perempuan sebagai simbol modernitas dan bagian integral dari visi nasional baik melalui narasi resmi Visi Saudi 2030, maupun media massa. Di sisi lain, Arab Saudi juga mengontrol partisipasi politik otonom dan mobilitas sosial perempuan. Dalam pendekatan feminisme pascakolonial, Spivak (1988) menyebut bahwa ketiga mekanisme ini dipahami sebagai cara negara mendominasi struktur kekuasaan. Akibatnya, suara perempuan seringkali tidak terdengar dan tidak memiliki kapasitas setara dalam mewakili kepentingannya sendiri karena selalu direpresentasikan oleh struktur dominan, yaitu negara.

Perempuan dalam analisis Spivak (1988) dipahami sebagai kelompok subaltern, yaitu kelompok yang tidak hanya terpinggirkan oleh relasi gender, tetapi juga oleh struktur sosial, politik, dan ekonomi dominan yang menyertainya. Praktik representasi terhadap perempuan menurut Spivak (1988) diinstrumentisasi untuk kepentingan pembangunan ekonomi dan modernisasi. Akibatnya, integrasi perempuan dalam proses pembangunan ekonomi dan modernisasi Visi Saudi 2030 tidak dibangun atas semangat emansipasi, melainkan bias terhadap kepentingan negara yang dikontrol secara terpusat. Penelitian ini melihat bahwa strategi tersebut menjamin stabilitas sosial berada di bawah kontrol kerajaan dan memastikan agensi perempuan bersifat teknokratis, apolitis, dan patuh terhadap otoritas negara.

Berdasarkan pemikiran Spivak (1988) Arab Saudi tidak hanya menjadikan isu perempuan sebagai instrumen politik, tetapi juga secara aktif mereproduksi relasi kuasa yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat sebagai objek kebijakan. Menurut Spivak (1988) konstruksi subjektivitas perempuan dalam wacana pembangunan mencerminkan ketimpangan relasi kuasa, saat pengalaman perempuan direduksi ke dalam bahasa pembangunan sehingga subjektivitas yang terbentuk sesuai dengan kebutuhan ekonomi nasional, bukan berdasarkan aspirasi perempuan itu sendiri. Pembangunan dan modernisasi merupakan arena kekuasaan yang dapat mereproduksi hierarki lama ke dalam bentuk baru (Ashcroft et al., 2025).

Transformasi selektif yang diterapkan dalam Visi Saudi 2030 menciptakan bentuk hibridisasi baru dalam mempertahankan unsur-unsur maskulinitas yang secara bersamaan mengadopsi beberapa aspek modernitas (Saputra dan Rodiah, 2025). Kerajaan mengintegrasikan partisipasi perempuan dalam struktur ekonomi baru untuk agenda pembangunan pasca-minyak, tanpa secara struktural mengubah relasi kuasa yang menempatkan posisi perempuan dalam struktur sosial masyarakat (Al-Rasheed, 2018). Pengalaman perempuan direduksi ke dalam bahasa pembangunan dan modernisasi ekonomi sehingga subjektivitas perempuan dibentuk agar selaras dengan kebutuhan ekonomi negara.

Pendekatan feminisme pascakolonial Spivak (1988) berupaya membuka ruang bagi keberagaman pengalaman dan perspektif perempuan yang terpinggirkan dalam wacana pembangunan nasional. Praktik representasi cenderung menyeragamkan pengalaman perempuan sebagai kelompok homogen yang sama-sama memperoleh manfaat transformasi secara merata (Bass, 2016). Penelitian ini melihat bahwa representasi perempuan dalam Visi Saudi 2030 telah mengubah subjektivitas perempuan Saudi yang sesuai dengan nilai-nilai pembangunan dan modernisasi ekonomi global. Akibatnya, nilai dari keberagaman perempuan Saudi itu tersendiri cenderung termarginalkan.

Di sisi lain, penelitian ini memandang Visi Saudi 2030 juga cenderung hanya merepresentasikan perempuan lokal Saudi, tanpa memperhatikan keberagaman perempuan Saudi dari berbagai kelas suku, ras, dan budaya lain. Hal ini diperkuat dengan pemerataan yang tidak tepat pada distribusi peluang partisipasi dalam agenda ekonomi pasca-minyak bagi seluruh lapisan masyarakat Saudi (Almohanna et al., 2025). Transformasi sosial lebih dirasakan oleh perempuan kelas atas di perkotaan, sedangkan perempuan di pedesaan dan kelompok minoritas lain masih terhambat struktur konservatif yang kuat (Almohanna et al., 2025). Representasi secara top down dalam Visi Saudi 2030 bersifat selektif dan eksklusif karena hanya menampilkan perempuan kelas atas yang mendapat akses pendidikan tinggi, sementara perempuan dalam kelompok menengah ke bawah dan minoritas, seperti pekerja informal, pekerja domestik migran, dan penganut syiah serta non-muslim memiliki keterbatasan dalam mencapai partisipasi ekonomi, terlebih ruang politik (Saleh dan Malibari, 2021)

Lebih jauh transformasi gender Arab Saudi dinilai tidak serius dalam mewujudkan kesetaraan bagi perempuan karena sistem perwalian yang menjadi dasar pembentukan struktur patriarki Saudi tidak sepenuhnya dihapus (Saputra dan Rodiah, 2025). Bahkan dalam menentukan keputusan dari kehidupan sehari-harinya, perempuan Saudi terjebak dalam struktur yang mengharuskan tunduk pada otoritas laki-laki. Penelitian ini melihat bahwa rekonstruksi subjektivitas perempuan dalam Visi Saudi 2030 dinilai sebagai penguatan kontrol negara atas tubuh dan suara perempuan subaltern Saudi sebagai reproduksi logika kolonial yang bermutasi dari kontrol kultural konservatif menjadi struktural ekonomi. Visi Saudi mengontrol perempuan melalui rekonstruksi subjektivitas yang menempatkannya sebagai objek dan instrumen produksi untuk agenda pembangunan pasca-minyak. Kerajaan meredefinisikan representasi perempuan untuk menyesuaikan struktur sosial masyarakat Saudi dengan agenda pembangunan ekonomi pasca-minyak.

Penelitian ini memandang beberapa transformasi gender yang membuka luas visibilitas perempuan sebagai strategi negara untuk mengintegrasikan perempuan ke

dalam kepentingan politisasi kerajaan sehingga kemajuan yang diklaim sebagai kesetaraan hanyalah sebuah ilusi belaka. Penelitian ini juga menilai transformasi gender dalam tatanan gender baru merupakan konsekuensi dari adaptasi struktur ekonomi baru Saudi dan mekanisme baru untuk memperkuat kontrol negara melalui reproduksi narasi dan rekonfigurasi relasi kuasa yang secara halus dibentuk melalui agenda pembangunan dan modernisasi. Perjuangan perempuan Saudi di era Visi Saudi 2030 tidak lagi mengenai kebebasan bergerak maupun bekerja, tetapi tentang perebutan ruang untuk berbicara mendefinisikan identitas dan menentukan sendiri posisinya di masyarakat Saudi modern. Praktik representasi terhadap subaltern dapat melanggengkan kontrol negara terhadap identitas, perilaku, dan narasi pemberdayaan perempuan (Parashar, 2016). Akibatnya, hal ini berpotensi menjadikan perempuan Saudi justru semakin rentan di bawah rezim gender yang baru dan menghilangkan agensi politik perempuan.

Pada logika ini, Visi Saudi 2030 menciptakan epistemic violence (kekerasan epistemic) atau kondisi yang dipahami oleh Spivak sebagai dominasi struktur kekuasaan yang memproduksi narasi dan representasi kelompok subaltern untuk mengganti dan mendistorsi suara subaltern dalam struktur sosial politik (Lewis dan Mills, 2003). Kondisi ini berpotensi menghapus dan menggantikan pengalaman perempuan sebagai agen politik yang dapat menentukan kepentingannya sendiri (Lewis dan Mills, 2003). Suara perempuan terlihat hadir karena direpresentasikan oleh negara, sedangkan pengalamannya sendiri secara otentik tidak terdengar dan termarginalisasi oleh struktur dominan. Penelitian ini memandang bahwa terdapat penguatan kontrol perempuan dalam struktur ekonomi baru melalui struktur konservatif agama dan struktur wacana pembangunan Visi Saudi 2030. Perubahan terhadap peningkatan visibilitas dan partisipasi perempuan dalam ekonomi tetap berlangsung dalam kerangka kontrol negara dan tidak secara murni berasal dari tuntutan serta pengalaman perempuan Saudi. Pemberdayaan perempuan yang otentik dan keadilan gender yang holistik semestinya dibentuk dengan membuka ruang partisipasi politik bagi keberagaman latar belakang dan pengalaman perempuan Saudi untuk menentukan sendiri arah kebijakan yang mempengaruhi kehidupannya, tidak hanya melalui peningkatan produktivitas ekonomi semata.

Simpulan

Visi Saudi 2030 lahir sebagai upaya untuk mengatasi krisis ekonomi nasional Arab Saudi sebagai negara rentier. Tuntutan terhadap penyesuaian struktur pembangunan ekonomi pasca-minyak telah mengubah tatanan gender yang memicu kontestasi antara

negara dan ortodoksi Wahabisme. Dengan menggunakan kerangka Spivak, penelitian ini berargumen bahwa Visi Saudi 2030 telah merekonstruksi subjektivitas perempuan dari kontrol kultural konservatif menjadi kontrol struktural wacana pembangunan ekonomi. Rekonstruksi tersebut tidak didasari oleh semangat emansipasi, tetapi oleh reproduksi logika koloni yang mengontrol perempuan melalui subjektivitas sebagai objek dan instrumen produksi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa subjektivitas tersebut direkonstruksi melalui produksi wacana pembangunan, institusionalisasi kebijakan yang top down, dan pembatasan ruang politik perempuan. Rekonstruksi subjektivitas ini adalah reformasi gender tanpa adanya liberalisasi politik perempuan, perubahan subjektivitas perempuan yang berlanjut dengan menempatkannya sebagai objek dan instrumen produksi sebagai reproduksi logika kolonial, dan kekerasan epistemik yang dapat mendistorsi agensi dan pengalaman perempuan Saudi.

Secara teoritis, penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi perempuan dalam Visi Saudi 2030 tidak dapat dipahami sebagai progresivitas gender, melainkan sebagai instrumen politik dalam mendukung agenda pembangunan ekonomi pasca-minyak. Temuan ini memperluas kajian Ilmu Hubungan Internasional melalui teori feminisme pascakolonial Spivak dengan melihat bagaimana proyek modernisasi ekonomi negara masih mereproduksi logika kolonial yang menempatkan perempuan sebagai objek kebijakan. Secara praktis, penelitian ini menekankan bahwa pemberdayaan perempuan dan keadilan gender yang holistik perlu diwujudkan dengan membuka ruang partisipasi politik yang substantif bagi seluruh lapisan perempuan untuk menyuarakan kepentingan sendiri secara otentik. Penelitian ini berfokus pada analisis kritik dokumen dan kebijakan negara terhadap subjektivitas perempuan tanpa menyoroti secara khusus respon perempuan Saudi. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan dapat mengeksplorasi bentuk resistensi dan negosiasi agensi perempuan Saudi dalam menyoroti keberagaman pengalaman perempuan seiring dengan pelaksanaan agenda Visi Saudi 2030.

Daftar Pustaka

- Afzal, N. dan Omar, A. (2021). The Saudi Vision 2030: Reproduction of Women's Empowerment in the Saudi Press: A Corpus-based Critical Discourse Analysis. *Register Journal*, [online] 14(1), pp.121–138. Dalam: <https://doi.org/10.18326/rgt.v14i1.121-138>.
- Ainurrofiq, F. dan Khasanah, N. (2024). From Domestic To Public: The Construction Of Women's Empowerment Discourse In Saudi Arabia's Vision 2030. *Akademika* :

Jurnal Pemikiran Islam, [online] 29(1), p.101. Dalam: <https://doi.org/10.32332/akademika.v29i1.7755>.

Akeel, M. (2025). Gender equality in politics remains a distant prospect, [online] Arab News. Dalam: <https://www.arabnews.com/node/2605417>.

Al Naimi, S.M. (2021). Economic Diversification Trends in the Gulf: the Case of Saudi Arabia. Circular Economy and Sustainability, [online] dalam: <https://doi.org/10.1007/s43615-021-00106-0>. [Diakses 10 Januari 2026]

Al-Rasheed, M. (2013). A Most Masculine State : Gender, Politics and Religion in Saudi Arabia. [online] Cambridge; New York: Cambridge University Press. [online] Dalam: <https://share.google/NWVTJC0dPkasq9Y67>. [Diakses 15 Februari 2026]

Al-Rasheed, M. (2018). Beyond Tradition and Modernity: Dilemmas of Transformation in Saudi Arabia, [online] Al Jazeera Center for Studies. Dalam: <https://studies.aljazeera.net/en/reports/2018/05/tradition-modernity-dilemmas-transformation-saudi-arabia-180514084243670.html>. [Diakses 15 Maret 2026]

Almohanna, R., Bryson, J.R. dan Qamar, A. (2025). Quiet Encroachment and Female Entrepreneurship in Saudi Arabia: An Intersectionality Plus Approach. Gender, Work & Organization, [online] 33(1), p.n/a. doi: <https://doi.org/10.1111/gwao.70024>.

Ansari, D. (2017). OPEC, Saudi Arabia, and the shale revolution: Insights from equilibrium modelling and oil politics. Energy Policy, [online] 111, pp.166–178. [online] Dalam: <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2017.09.010>. [Diakses 10 Januari 2026]

Ashcroft, B., Griffiths, G. dan Tiffin, H. (2025). Postcolonial Studies, [online] Taylor & Francis. Dalam: www.tandfonline.com/journals/cpcs20.

Bass, R. (2016). Arab Women in Development: A Postcolonial Legacy, [online] SURFACE at Syracuse University. [online] Dalam: https://surface.syr.edu/honors_capstone/969. [Diakses 20 Maret 2026]

- Bennett, A. dan Elman, C. (2007). Case Study Methods In The International Relations Subfield. *Comparative Political Studies*, 40(2), pp.170–195. [online] dalam: <https://doi.org/10.1177/0010414006296346>. [Diakses 10 Maret 2026]
- Cerioli, L. (2019). Driving in the Middle of the road: Paradoxes of Women’s Role under the New Saudi Arabian Nationalism. *Ex Aequo - Revista Da Associação Portuguesa De Estudos Sobre as Mulheres*, [online] (40). Dalam: <https://doi.org/10.22355/exaequo.2019.40.04>. [Diakses 13 Maret 2026]
- CNN Indonesia (2024). Pangeran MbS soal Wahabisme di Saudi: Bin Abdul Wahhab Bukan Nabi, [online] internasional. Dalam: <https://share.google/elsKSim2w7ZKOLrMI> [Diakses 22 Feb. 2026].
- Coptic Solidarity (2021). Saudi Crown Prince Mohammed Bin Salman’s Far-Reaching Statements On Religion Herald Further Reforms - Coptic Solidarity, [online] Coptic Solidarity. Dalam: <https://www.copticsolidarity.org/2021/05/04/saudi-crown-prince-mohammed-bin-salmans-far-reaching-statements-on-religion-herald-further-reforms/> [Diakses 22 Feb. 2026].
- Council on Foreign Relations (2025). Growing Economies Through Gender Parity. [online] Council on Foreign Relations. Dalam: <https://www.cfr.org/womens-participation-in-global-economy/>.
- Croghan, L. (2024). Resisting change: Women and Youth in a post-oil World Analysing Saudi Arabia’s Vision2030 Reforms. *ANU Undergraduate Research Journal*, [online] 13(1), pp.30–38. Dalam: <https://studentjournals.anu.edu.au/index.php/aurj/article/view/857>.
- Dorinde (2020). Women and regime stability in Saudi Arabia. [Thesis] pp.1–61. [online] Dalam: <https://share.google/zGhyGodIRmnwd1Usa>. [Diakses 20 April 2026]
- El-Bakr, F. (2022). Empowering Saudi Women under Vision 2030: Opportunities and Challenges. *International Journal of Childhood and Women’s Studies*, [online] 2(4), pp.1–12. Dalam: <https://doi.org/10.21608/ijcws.2022.270720> [Diakses 19 Desember 2025].

- El-Komy, F. (2024). Vision 2030: Empowered Women, Transformed Kingdom. [online] Al Habtoor Research Centre. Dalam: <https://www.habtoorresearch.com/programmes/vision-2030-empowered-women-transformed-kingdom/>. [Diakses 12 Januari 2026]
- Eum, I. (2019). 'New Women for a New Saudi Arabia?' Gendered Analysis of Saudi Vision 2030 and Women's Reform Policies. *Asian Women*, [online] 35(3), pp.115–133. Dalam: <https://doi.org/10.14431/aw.2019.09.35.3.115>. [Diakses 14 Maret 2026]
- General Authority for Statistic (2023). Labor Market Statistics Labor Market Statistics, [online] الهيئة العامة للإحصاء. Dalam: <https://www.stats.gov.sa/en/statistics-tabs?tab=436312&category=417515>. [Diakses 15 Desember 2025]
- Grand, S. dan Wolff, K. (2020). Assessing Saudi Vision 2030: A 2020 Review, [online] Dalam: <https://www.atlanticcouncil.org/wp-content/uploads/2020/06/Assessing-Saudi-Vision-2030-A-2020-review.pdf>. [Diakses 13 April 2026]
- Hoza, J.L. (2019). Is There Feminism in Saudi Arabia? *UF Journal of Undergraduate Research*, [online] 20(2). Dalam: <https://doi.org/10.32473/ufjur.v20i2.106192>. [Diakses 20 Januari 2026]
- Htun, M. dan Weldon, S.L. (2018). *The Logics of Gender Justice*, [online] Cambridge University Press. Dalam: <https://doi.org/10.1080/1554477X.2019.1671743>. [Diakses 15 Februari 2026]
- Hudhayri, K. (2021). Female Identity Reconstruction in Saudi Arabia. *Global Journal of Art, Humanities and Social Sciences*, [online] 9(10), pp.24–34. Dalam: <https://eajournals.org/gjahss/vol-9-issue10-2021-2/female-identity-reconstruction-in-saudi-arabia/>. [Diakses 15 Maret 2026]
- Human Rights Watch (2018). Saudi Arabia: Growing Crackdown on Women's Rights Activists, [online] Human Rights Watch. Dalam: <https://www.hrw.org/news/2018/05/23/saudi-arabia-growing-crackdown-womens-rights-activists>. [Diakses 13 Maret 2026]

- Jamilah, M. dan Isnarti, R. (2024). Pioneering Change: Women's Economic Empowerment under Saudi Vision 2030. *Sawwa Jurnal Studi Gender*, [online] 19(2), pp.169–200. [online] Dalam: <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/sawwa/article/view/23305>. [Diakses 12 Maret 2026]
- Jawadi, F. dan Ftiti, Z. (2019). Oil price collapse and challenges to economic transformation of Saudi Arabia: A time-series analysis. *Energy Economics*, [online] 80(1), pp.12–19. [online] dalam: <https://doi.org/10.1016/j.eneco.2018.12.003>. [Diakses 20 Februari 2026]
- Lewis, R. dan Mills, S. (2003). *Feminist Postcolonial Theory: a Reader*, [online] New York: Routledge. [online] Dalam: www.jstor.org/stable/10.3366/j.ctvxcr9q0. [Diakses 20 Januari 2026]
- McKinsey Global & Company (2015). *Saudi Arabia Beyond Oil: The Investment And Productivity Transformation*, [online] McKinsey Global Institute, pp.1–24. Dalam: https://www.mckinsey.com/~media/mckinsey/featured%20insights/Employment%20and%20Growth/Moving%20Saudi%20Arabias%20economy%20beyond%20oil/MGI%20Saudi%20Arabia_Executive%20summary_December%202015.ashx. [Diakses 12 Januari 2026]
- Morris, R.C. (2010). *Can the Subaltern Speak? Reflections on the History of an Idea*. [online] New York Columbia University Press. [online] Dalam: <https://share.google/EUGCW8pEu9fd8pSTT>. [Diakses 14 Februari 2026]
- Mufiedah, A.I., Harini, S. and Haqqi, H. (2020). Reformasi Hak-Hak Perempuan Arab Saudi Melalui Saudi Vision 2030 Tahun 2017-2019. *Solidaritas*, [online] 4(3). Dalam: <https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/sldrts/article/view/5519> [Diakses 14 Januari 2026]
- Muttaqin, F.F., Hady, Y., Krisnawati, N.M., Susanti, E. dan Rohwati, S. (2025). Reformulating Gender Norms In Saudi Arabia: Cultural Liberalization Under Vision 2030. *Jurnal Harkat Media Komunikasi Gender*, [online] 21(1), pp.126–152. Dalam: <https://doi.org/10.15408/harkat.v21i1.49070>. [Diakses 12 Maret 2026]

Narayanan, N. (2024). Saudi Arabia targeting 40% female workforce participation by 2030: Al-Jadaan, [online] Arab News. Dalam: <https://www.arabnews.com/node/2577394/business-economy>. [Diakses 13 Maret 2026]

Parashar, S. (2016). Feminism and Postcolonialism: (En)gendering Encounters. *Postcolonial Studies*, [online] 19(4), pp.371–377. Dalam: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13688790.2016.1317388>. [Diakses 13 Maret 2026]

Rampal, N. (2022). Is Saudi Arabia doing better than India in bridging gender gap? WEF report says yes, [online] ThePrint. Dalam: <https://theprint.in/world/is-saudi-arabia-doing-better-than-india-in-bridging-gender-gap-wef-report-says-yes/1036026/>. [Diakses 13 Desember 2025]

Saikuddin, A. and Amrullah, A.K. (2023). The Dynamics Of Gender Equality And New Directions For The Role Of Saudi Women. *CMES: Centre of Middle Eastern Studies*, [online] 16(1), pp.51–59. Dalam: <https://doi.org/10.20961/cmes.16.1.64149> [Diakses 20 Desember 2025]

Saleh, W. dan Malibari, A. (2021). Saudi Women and Vision 2030: Bridging the Gap? *Behavioral Sciences*, [online] 11(10), p.132. Dalam: <https://doi.org/10.3390/bs11100132>. [Diakses 12 Desember 2025]

Saputra, B.A. dan Rodiah, I. (2025). Ketidaksetaraan Gender, Wahabisme Dan Visi Saudi 2030: Kritik Feminisme Postkolonial Melawan Ketidakadilan Di Arab Saudi. *Abdurrauf Law and Sharia*, [online] 2(1), pp.88–111. Dalam: <https://doi.org/10.70742/arlash.v2i1.199> [Diakses 9 Januari 2026].

Saudi Vision 2030 (2016). *Vision 2030 Kingdom of Saudi Arabia*, [online] Riyadh: Government of Saudi Arabia, pp.1–85. [online] Dalam: <https://www.vision2030.gov.sa/en/overview>. [Diakses 10 Maret 2026]

Saudi Vision 2030 (2024). *Vision 2030 Annual Report 2024*, [online] Riyadh: Kingdom of Saudi Arabia, pp.1–279. [online] Dalam: <https://www.vision2030.gov.sa/en/annual-reports>. [Diakses 10 Maret 2026]

- Schulte, A. (2024). Saudi Arabia's Vision 2030 Program Explained - Centuro Global, [online] Centuro Global. [online] Dalam: <https://www.centuroglobal.com/article/saudi-arabia-vision-2030/>. [Diakses 11 April 2026]
- Spivak, G.C. (1988). Can the Subaltern Speak? *Die Philosophin*, [online] 14(27), pp.24–28. [online] Dalam: <https://jan.ucc.nau.edu/~sj6/Spivak%20CanTheSubalternSpeak.pdf>. [Diakses 20 April 2026]
- Teckchandani, J. dan Dhingra, R. (2025). Saudi Arabia's Vision 2030: Implications For Women. *TPM – Testing, Psychometrics, Methodology in Applied Psychology*, [online] 32(56), pp.912–917. Dalam: <https://tpmap.org/submission/index.php/tpm/article/view/1871>. [Diakses 15 Maret 2026]
- Topal, A. (2019). Economic Reforms and women's Empowerment in Saudi Arabia. *Women's Studies International Forum*, [online] 76(102253), p.102253. Dalam: <https://doi.org/10.1016/j.wsif.2019.102253>. [Diakses 16 Maret 2026]
- Tripp, A.M. (2019). *Seeking Legitimacy*, [online] Cambridge University Press. Dalam: <https://share.google/nMCllriTCctmnShT>. [Diakses 15 Maret 2026]
- Ulya, N. dan Basyar, H. (2026). Ulama And Vision 2030: Saudi Arabia Government's Strategies To Navigate A Successful Economic Reform. *UI Scholars Hub*, [online] 27(2). Dalam: <https://scholarhub.ui.ac.id/global/vol27/iss2/3> [Diakses 10 Februari 2026].
- UN Women (2026). *Country Snapshot | UN Women Data Hub*, [online] data.unwomen.org. Dalam: <https://data.unwomen.org/arab-states/country/saudi-arabia>. [Diakses 14 Maret 2026]
- Vasinton, C. (2020). Saudi Arabia's Socio-Economic Development: Issues of Gender and State Identity | *Ústav mezinárodních vztahů - Expertise to impact*, [online] www.iir.cz. [online] Dalam: <https://www.iir.cz/saudi-arabia-s-socio-economic-development-issues-of-gender-and-state-identity>. [Diakses 12 Februari 2026]

World Economic Forum (2025). Gender Global Gap Report 2025, [online] Dalam: https://reports.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2025.pdf. [Diakses 12 Maret 2026]